



# BUPATI PATI

## PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 20 TAHUN 2010

### TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KECAMATAN DAN DESA / KELURAHAN YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati, perlu diberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Desa / Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan Yang Berprestasi Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Kepada Kecamatan dan Desa / Kelurahan yang Berprestasi Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Sebelum Jatuh Tempo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO.**

**Pasal 1**

Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan diberikan insentif.

**Pasal 2**

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berdasarkan pada prestasi paling cepat waktu pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.

### Pasal 3

Pemberian insentif kepada Kecamatan didasarkan pada baku Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing Kecamatan dikalikan dengan persentase sesuai dengan bulan pelunasan.

### Pasal 4

Pemberian insentif kepada desa/kelurahan didasarkan pada baku Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing Desa/Kelurahan dikalikan dengan persentase sesuai dengan bulan pelunasan.

### Pasal 5

Besarnya persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan yang lunas pada bulan Mei sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. Kecamatan yang lunas pada bulan Juni sebesar 8 % (delapan persen);
- c. Kecamatan yang lunas pada bulan Juli sebesar 6 % (enam persen);
- d. Kecamatan yang lunas pada bulan Agustus sebesar 4 % (empat persen);
- e. Kecamatan yang lunas pada bulan September sebesar 2 % (dua persen);

### Pasal 6

Besarnya persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Desa/Kelurahan yang lunas pada bulan Mei sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. Desa/Kelurahan yang lunas pada bulan Juni sebesar 8 % (delapan persen);
- c. Desa/Kelurahan yang lunas pada bulan Juli sebesar 6 % (enam persen);
- d. Desa/Kelurahan yang lunas pada bulan Agustus sebesar 4 % (empat persen);
- e. Desa/Kelurahan yang lunas pada bulan September sebesar 2 % (dua persen);

#### Pasal 7

Kecamatan yang mendapatkan insentif pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan penambah plafon belanja pada perubahan anggaran tahun berjalan atau penambah plafon belanja pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 8

Kelurahan yang mendapatkan insentif pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan penambah plafon belanja pada perubahan anggaran tahun berjalan atau penambah plafon belanja pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 9

Desa yang mendapatkan insentif pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai berikut :

- a. diterima pada minggu berikutnya sejak Desa melunasi Pajak Bumi dan Bangunan yang disertai dengan bukti pelunasan dari tempat pembayaran;
- b. penyalurannya melalui rekening kas Desa;
- c. pemanfaatannya untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan kebutuhan Desa masing-masing dan penggunaannya dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 10

Pemberian insentif dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan Yang Berprestasi Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 556) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 17 Maret 2010

**BUPATI PATI,**

**Ttd**

**T A S I M A N**

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 17 Maret 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI**  
**Kepala Badan Kepegawaian Daerah**

**Ttd**

**HARYANTO, SH. MM**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19640408 199103 1011**

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**INDRIYANTO, SH**

**Pembina**

**NIP. 19670226 199203 1 005**